

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergerakan ekonomi Indonesia merupakan kombinasi perubahan berbagai aktifitas ekonomi di Indonesia. Setiap lapangan usaha dapat berkontribusi positif (pertumbuhan) atau negatif (penurunan) terhadap agregasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor jasa keuangan, terutama lembaga perbankan, yang kuat dapat mendorong aktifitas ekonomi lebih cepat tumbuhnya. Bisnis perbankan bergerak cepat mengikuti ekspansi ekonomi Indonesia yang relatif tinggi dibanding kebanyakan negara lain di dunia. Akibatnya terjadi persaingan antar bank yang cukup ketat. Agar tetap bertahan hidup, suatu bank perlu mempunyai keunggulannya masing-masing, terutama bila dibandingkan dengan bank lainnya. Suatu bank mampu berkompetisi bila dipercaya oleh para pemangku kepentingan seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah, Bank Sentral, dan khususnya para pelanggan bank. Agar dapat dipercaya, suatu bank harus terbukti dikelola secara sehat. Untuk mengetahui sehat tidaknya kondisi bisnis perbankan, perlu dilakukan evaluasi kinerja keuangan perbankan.

Aktifitas ekonomi, baik mikro maupun makro, memerlukan mediasi institusi keuangan (*financial intermediary*), terutama sistem perbankan. Bank memperoleh dana dari sejumlah orang atau kelompok yang memiliki dana yang berlebih serta mengalirkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Menurut Simorangkir (2004), supaya bank berfungsi dengan baik sebagai entitas bisnis jasa keuangan dimana aset pokok adalah kepercayaan pelanggan, maka setiap bank sebaiknya selalu menambah pelanggan atau nasabah, meningkatkan dana titipan, dan menaikkan penyaluran kredit maupun pemberian jasa perbankan lainnya.

Bank Indonesia menyebutkan bahwa Bank Persero/Milik Pemerintah, Bank Umum Swasta devisa/non-devisa, Bank Pembangunan Daerah, Bank campuran, dan Bank asing sebagai Bank Umum Konvensional.

Mengingat fungsi perbankan adalah perantara jasa keuangan, maka bank dituntut mempunyai *performance* keuangan yang *excellent* atau sangat baik. Sehingga dapat menjadi pilihan utama para pelanggan jasa keuangan (*Agent of Trust*). Bank sebagai badan usaha dalam sektor jasa keuangan atau finansial benar-benar memerlukan keyakinan dari customer, yang mana kepercayaan nasabah ini sangat mendukung dalam kelancaran kegiatan usaha bank tersebut. Sehingga kesejahteraan para pemegang saham (*stakeholder*) dapat tercapai serta nilai perusahaan turut meningkat (Sukarno, 2006).

Semua kegiatan usaha termasuk operasional perbankan membutuhkan biaya kegiatan sehari-hari atau biaya operasional. Biaya operasional utama bisnis perbankan adalah pembayaran bunga berbagai jenis tabungan atau simpanan, piutang yang tidak dapat ditagih, penyusutan, dsb. jika Apabila biaya operasional lebih rendah dari perolehan operasional maka usaha perbankan akan mempunyai imbal hasil positif. Perbandingan dari Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dapat memberikan gambaran umum apakah kegiatan usaha perbankan menghasilkan output yang diharapkan. Semakin kecil rasio tersebut, maka mengindikasikan pendapatan (operasional) usaha perbankan lebih besar dari biaya (operasional) nya. Akibatnya imbal hasil bank juga akan semakin tinggi. Oleh karenanya BOPO banyak dimanfaatkan untuk mengukur tepat guna, efisiensi, dan keberhasilan bank melakukan kegiatan operasional bisnisnya.

Pada dasarnya resiko suatu usaha semakin membesar bila keberlangsungan usaha tersebut semakin tidak jelas. Siamat (2005) berpendapat bahwa bisnis perbankan akan menemui berbagai jenis resiko ketika melakukan operasional bisnisnya. Risiko yang

muncul bisa menyebabkan gangguan terhadap suatu usaha perbankan bila tidak dilacak dan di-*manage* secara benar. Resiko yang dapat dialami dalam usaha perbankan antara lain adalah:

- a. Resiko pemberian kredit
- b. Resiko melakukan investasi
- c. Resiko menjalankan kegiatan operasional
- d. Resiko terjadinya penyelewengan

Resiko operasional semakin membesar bila kaitan biaya operasional dengan pendapatan operasional juga semakin tidak terdeteksi. Oleh karena itu pihak perbankan maupun otoritas perbankan secara periodik memantau perkembangan perubahan rasio BOPO setiap bank dari waktu ke waktu. Jika rasio ini mengalami kenaikan; dapat disebabkan adanya kenaikan sisi biaya atau ada penurunan sisi pendapatan. Biaya dapat bertambah tinggi karena berbagai sebab, misalnya ada kenaikan bunga simpanan, piutang tak tertagih, biaya administrasi umum, dan sebagainya. Pendapatan dapat menurun misalnya karena penerimaan bunga, komisi, atau penjualan valas menurun.

Sebagai contoh kasus pengendalian BOPO perbankan, yang dilakukan oleh Bank Indonesia

(<http://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/12/1517034/BI.Minta.Bank.Turunkan.BOPO1> 2 Maret 2012) selaku otoritas perbankan di Indonesia, adalah memberikan peringatan terhadap bank yang memiliki rasio BOPO nya di atas 90% untuk menurunkan sekitar 10 poin. Bahkan bila memungkinkan diturunkan sekitar 20-30 poin dari kondisi sekarang. Dalam jangka menengah panjang ditargetkan turun 30-50 poin atau mencapai rasio diantara 40 % dan 60% sesuai capaian sejumlah negara anggota ASEAN lainnya

Tindakan lebih keras dilakukan otoritas perbankan di tahun 2013. Melalui Surat Edaran No. 15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013, Bank Indonesia meminta perbankan lebih

efisien melakukan kegiatannya. Suatu bank hanya diperbolehkan membuka cabang baru jika memenuhi syarat rasio BOPO antara 60 % hingga maksimum 85 %, sesuai kelompok usaha bank umum (BUKU) yang bersangkutan. Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Irwan Lubis mengatakan *benchmark* merupakan perhitungan internal BI sebagai panduan bagi pengawas dalam menilai rencana pengembangan jaringan kantor perbankan. Dengan tidak dapatnya dipenuhi standarisasi BOPO yang ditetapkan oleh BI, maka Bank tidak dapat melakukan ekspansi kantor cabang sekaligus tidak dapat melaksanakan ekspansi pelayanan untuk mendapatkan *market* atau nasabah-nasabah yang baru sehingga dapat menghambat peningkatan pendapatan operasionalnya.

Seberapa besar kemampuan setiap institusi perbankan dalam mempertahankan daya saing yang tinggi merupakan upaya kuat perbankan dalam melakukan kelangsungan operasionalnya. Tingkat efisiensi operasional serta kemampuan bank dalam menghadapi setiap gangguan yang muncul, baik secara internal maupun eksternal merupakan cerminan atas kemampuan bank untuk dapat mampu bersaing. Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi sebuah tantangan nyata yang harus dihadapi oleh perbankan. Dengan adanya lembaga perbankan regional yang telah memiliki tingkat efisiensi operasional yang relatif tinggi maka membuat setiap perbankan untuk dapat bersaing agar dapat mencapai tingkat efisiensi yang relatif tinggi tersebut. Mengingat bahwa keberadaan lembaga perbankan nasional memiliki arti yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pembangunan ekonomi nasional, maka apabila terdapat kegagalan dalam persaingan ini dapat berpotensi menyebabkan bank-bank nasional tersisih dari pasarnya sendiri.

Kemampuan dalam bersaing di perbankan dapat terlihat dari seberapa besar atau kecilnya efisiensi operasional atau dari rasio biaya operasional pendapatan operasional

(BOPO) perbankan. Namun, besar atau kecilnya tingkat rasio BOPO ini akan sangat bergantung pada berbagai faktor.

Penelitian mengenai kinerja operasional perbankan yang diukur melalui rasio BOPO sudah lama menjadi pusat dari penelitian akademis dan telah mendapatkan banyak perhatian yang substantial, namun demikian rasio BOPO yang diteliti seringkali menjadi independent variable, dan belum banyaknya penelitian yang menjadikan rasio BOPO menjadi dependen variable.

Besaran total aset perbankan (*bank size*) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja operasional perbankan yang dalam penelitian ini diwakili oleh rasio BOPO. Fadzlan dan Fakarudin (2015) berpendapat bahwa *bank size* berpengaruh signifikan terhadap rasio BOPO. Hal tersebut mengindikasikan bahwa total aset yang dimiliki oleh perbankan mempengaruhi rasio efisiensi atau rasio BOPO perbankan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Benito, et.al (2013) menyampaikan bahwa semakin besar total aset perbankan (*bank size*) maka akan meningkatkan rasio BOPO perbankan, dalam hal ini *bank size* berpengaruh positif terhadap rasio BOPO, sehingga semakin besarnya aset perbankan, maka semakin besar biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh perbankan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dong, et.al (2015) bahwa *bank size* dari suatu perbankan berpengaruh positif terhadap rasio BOPO, sehingga biaya operasional perbankan akan meningkat atau rasio efisiensi perbankan akan menurun. Namun hasil lain ditemukan oleh Pancurova, et.al (2013) bahwa hubungan antara *bank size* dengan rasio BOPO adalah signifikan negatif, dimana semakin besarnya aset yang dimiliki oleh perbankan, maka perbankan akan dapat meminimalisir biaya operasional yang dikeluarkan. Penelitian itu pun juga didukung oleh hasil penelitian oleh Abbas, et.al (2016) yang mengemukakan bahwa *bank size* memberikan pengaruh signifikan secara negatif dengan rasio BOPO.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi rasio BOPO dari perbankan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR) yang merupakan rasio kecukupan permodalan dari perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Ajlouni, et.al (2011) menyatakan bahwa semakin besar CAR yang dimiliki perbankan, maka rasio BOPO akan meningkat, begitupula sebaliknya bahwa CAR perbankan menurun, maka rasio BOPO juga menurun. Sehingga CAR berpengaruh positif terhadap CAR. Sedangkan Candra dan Yulianto (2015) menyampaikan bahwa faktor CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio BOPO. Namun hasil yang berbeda yang didapatkan dalam penelitian oleh Pancurova, et.al (2013) bahwa CAR memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap rasio BOPO perbankan, sehingga semakin besar rasio kecukupan modal yang dimiliki perbankan, maka rasio BOPO dapat diminimalisir. Hasil penelitian tersebut pun didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pham Thien Nguyen dan Hong Nghiem (2015) bahwa CAR memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap rasio BOPO perbankan, sehingga semakin meningkatnya rasio CAR maka rasio BOPO akan menurun.

Non-performing loan (NPL) merupakan faktor lain yang dapat memberikan pengaruh atas rasio BOPO perbankan. Hal ini didukung oleh penelitian Sufian, et.al (2010) yang menyampaikan bahwa NPL memberikan pengaruh signifikan positif terhadap rasio BOPO, sehingga dengan semakin besarnya rasio NPL perbankan, maka perbankan wajib mencadangkan biaya untuk menutupan kredit yang masuk dalam golongan NPL. Penelitian tersebut juga didukung oleh Pham Thien Nguyen dan Hong Nghiem (2015) yang juga menyatakan bahwa rasio NPL memberikan pengaruh signifikan terhadap rasio BOPO. Namun terdapat hasil yang berbeda terkait pengaruh rasio NPL terhadap rasio BOPO dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Subandi dan Ghazali (2010) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan atas rasio NPL terhadap rasio BOPO. Penelitian itu pun didukung oleh Candra dan Yulianto (2015) yang juga

menyatakan bahwa rasio NPL tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rasio BOPO perbankan.

Faktor internal perbankan lainnya yang dapat mempengaruhi rasio BOPO perbankan adalah Loan to deposit ratio (LDR) dimana penelitian yang dilakukan oleh Sufian dan Kamarudin (2015) menyatakan bahwa rasio LDR memberikan pengaruh terhadap rasio BOPO perbankan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Xiang, et.al (2015) rasio LDR memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap rasio BOPO. Penelitian tersebut didukung oleh Candra dan Yulianto (2015) yang menyatakan bahwa rasio LDR memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap rasio BOPO perbankan.

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan merupakan rasio yang telah ditentukan oleh regulator untuk dipenuhi oleh perbankan yang juga dapat memberikan pengaruh terhadap rasio BOPO perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Demirguc-Kunt, et.al (2003) menghasilkan bahwa peraturan tentang kepatuhan yang diwajibkan untuk dapat dipenuhi oleh perbankan, dalam hal ini diwakili dengan rasio GWM, memberikan pengaruh signifikan positif terhadap rasio BOPO. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Bandarayanake dan Jayasinghe (2014) yang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan dari pemerintahan agar perbankan wajib memenuhi nilai tertentu, dalam hal ini wajib memenuhi rasio GWM, maka memberikan pengaruh signifikan positif terhadap rasio BOPO, sehingga dari penelitian-penelitian tersebut dinilai bahwa peraturan tersebut memberikan ruang yang sempit terhadap perbankan untuk mengembangkan bisnisnya.

Faktor lainnya yang mempengaruhi rasio BOPO perbankan adalah public ownership (PO) atau seberapa besarnya, dalam hitungan persentase, kepemilikan publik terhadap perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Purroy dan Salas (2000) memberikan hasil bahwa perbankan yang memiliki persentase kepemilikan yang

seimbang antara publik dan internal perbankan tersebut memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap rasio BOPO, dimana jika kepemilikan publik dan swasta pada perbankan seimbang (50:50) maka rasio BOPO dapat ditekan. Penelitian itu pun didukung oleh Pham Thien Nguyen dan Hong Nghiem (2015) yang menyatakan bahwa semakin besar porsi (persentase) public ownership, maka akan semakin dapat menurunkan rasio BOPO perbankan tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Altunbas, et.al (2007) bahwa perbankan yang memiliki kepemilikan yang seimbang dengan masyarakat (publik) akan memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap rasio BOPO apabila perbankan terkait memiliki rasio CAR yang rendah.

Pada penelitian ini, objek yang dipilih adalah perbankan yang telah *go public* dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Alasan pemilihan perbankan yang telah *go public* adalah merupakan emiten yang sahamnya termasuk yang paling aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Masing-masing perbankan yang telah *go public* di BEI tersebut memiliki ikhtisar keuangan yang berbeda-beda, namun terdapat rasio-rasio keuangan yang wajib dipenuhi oleh masing-masing perbankan tersebut dikarenakan terdapat ketentuan yang dipersyaratkan oleh regulator perbankan, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ikhtisar keuangan dari masing-masing perbankan selalu berubah bahkan ada yang mengalami fluktuasi, ada kalanya menurun dan ada kalanya meningkat. Adapun data empiris *bank size*, *capital adequacy ratio*, *non-performing loan*, *loan to deposit ratio*, giro wajib minimum, dan public ownership pada perbankan yang *go public* periode 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel 1.1. sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rata-Rata BOPO, *Bank Size*, LDR, CAR, GWM, NPL, dan PO Bank Go Public
Tahun 2012-2016

Rasio Keuangan	2012	2013	2014	2015	2016
BOPO (%)	77.45	74.45	72.65	81.49	82.85
Bank Size (Rp. Milyaran)	1,264,736	1,369,620	1,535,324	5,919,406	6,729,799
LDR(%)	71.32	79.84	81.51	92.11	90.50
CAR(%)	21.00	23.04	23.78	21.39	22.69
GWM (%)	8.71	8.84	9.48	8.16	7.44
NPL (%)	5.66	5.47	5.31	2.61	2.93
PO (%)	23.52	24.61	25.21	24.34	26.32

Sumber : situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (data olahan)

Dari data pada tabel 1.1 diatas terlihat bahwa tidak terdapat pola hubungan yang konsisten antara rasio BOPO dengan bank size, LDR, CAR, GWM, NPL, dan Public Ownership. Berdasarkan data tersebut, dapat ditemukan ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan (phenomenon gap) yang terjadi pada faktor-faktor internal perbankan yang mempengaruhi rasio BOPO. Adapun phenomenon gap dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Delis dan Papanikolaou (2009), Ajlouni, et.al (2011), Pancurova, et.al (2013), dan Abbas dan Azid (2016) menyatakan bahwa faktor bank size memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap rasio BOPO, namun berdasarkan pada tabel 1.1 terjadi sebaliknya dimana semakin besarnya bank size, rasio BOPO mengalami peningkatan.
2. Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya rasio LDR menimbulkan penurunan rasio efisiensi atau peningkatan rasio BOPO. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Xiang, et.al (2015 dan Candra dan Yulianto (2015) bahwa faktor LDR memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap rasio BOPO.
3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fadzlan dan Habibullah (2010) serta Bandaranayake dan Jayasinghe (2013) menyatakan bahwa CAR memberikan pengaruh signifikan negatif

terhadap rasio BOPO, sedangkan pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dengan kondisi CAR yang relatif stabil, rasio BOPO cenderung mengalami peningkatan.

4. Kondisi NPL perbankan pada tabel 1.1 memperlihatkan trend menurun, namun demikian kondisi rasio BOPO cenderung meningkat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadlan dan Habibullah (2010) dan Pham Thien Nguyen dan Hong Nghiem (2015) menyatakan bahwa rasio NPL perbankan memberikan pengaruh signifikan positif terhadap rasio BOPO.
5. Kondisi GWM pada tabel 1.1 dapat dinyatakan fluktuatif, dan rasio BOPO terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 – 2016. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Bandaranayake dan Jayasinghe (2013) yang menyatakan bahwa semakin besarnya ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah maka semakin besar juga rasio BOPO. Pada tabel 1.1 tersebut bahwa perbankan yang *go public* di periode 2012 -2016 cenderung tidak konsisten untuk mematuhi ketentuan yang telah diterapkan oleh pemerintah.
6. Pada tabel 1.1 tersebut bahwa persentase dari *public ownership* pada perbankan *go public* tahun 2012 – 2016 yang berkisaran di angka 23%-26% memberikan pengaruh positif terhadap rasio BOPO, dimana rasio BOPO mengalami peningkatan dengan kondisi persentase *public ownership* tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya rasio BOPO. Adanya hasil yang beragam tersebut menimbulkan adanya kesenjangan temuan atau sering disebut dengan istilah *research gap*. Adapun *research gap* yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini dapat dirangkum dan dijelaskan dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2

Research Gap

No	Pengaruh Variabel	Peneliti	Model Analisis	Hasil
1.	<i>Bank size</i> terhadap rasio BOPO	a. Sufia, et.al (2015) b. Pancurova, et.al (2013) c. Sanchez, et.al (2013) dan Xiang, et.al (2015)	a. Data Envelopment Analysis dan Analisis regresi b. Data Envelopment Analysis dan Analisis regresi c. Data Envelopment Analysis dan Analisa Data Panel	a. Pengaruh signifikan b. Negatif signifikan c. Positif signifikan
2.	<i>Capital Adequacy Ratio</i> terhadap rasio BOPO	a. Candra dan Yulianto (2015) b. Ajlouni, et.al (2011) c. Abbas, et.al (2016)	a. Analisa regresi b. Data Envelopment Analysis c. Data Envelopment Analysis	a. Tidak berpengaruh signifikan b. Positif signifikan c. Negatif signifikan
3.	Rasio <i>Non-Performing Loan</i> terhadap Rasio BOPO	a. Candra dan Yulianto (2015) b. Pham Thien Nguyen dan Hong Nghiem (2015)	a. Analisa regresi b. Data Envelopment Analysis	a. Tidak berpengaruh b. Positif signifikan
4	Loan to Deposit Ratio terhadap rasio BOPO	a. Muljawan, dkk. (2014) b. Sufian, et.al (2015)	a. Analisa Regresi b. Data Envelopment Analysis	a. Berpengaruh positif b. LDR memberikan pengaruh signifikan.
5	Rasio Giro Wajib Minimum terhadap rasio BOPO	a. Bandaranayake dan Jayasinghe (2013) b. Kebijakan Bank Negara Malaysia (1998)	a. Analisa data panel	a. Positif signifikan b. Positif signifikan
6	Public Ownership terhadap rasio BOPO	a. Ascarya dan Yumanita (2006) b. Putri dan Lukviarman	a. Data Envelopment Analysis b. Data Envelopment	a. Positif signifikan b. Positif signifikan c. Negatif signifikan

		(2008) c. Pham Thien Nguyen dan Hong Nghiem (2015)	Analysis c. Data Envelopment Analysis	
--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil penelitian seperti dijelaskan pada tabel research gap tersebut di atas menunjukkan bahwa terjadi kontradiksi antara peneliti satu dengan lainnya, terutama pada variabel *bank size*, CAR, NPL, LDR, dan Public Ownership. Untuk itu dalam penelitian ini akan menguji kembali dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang hasilnya masih inkonsisten. Hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, bahwa pada penelitian ini menggabungkan dari beberapa peneliti yaitu bank size, CAR, NPL, LDR, GWM, dan *Public Ownership* sebagai independen variabel dan rasio BOPO menjadi dependen variabel dengan metode analisa data panel sebagai metode penelitian.

1.2 Perumusan Masalah

Studi ini merumuskan permasalahan dikarenakan rasio BOPO meningkat atau *efficiency ratio* yang menurun dari tahun 2012 hingga tahun 2016, sehingga perlu untuk diketahui variabel-variabel manakah dari Bank Size, LDR, CAR, GWM, NPL, dan PO yang memicu peningkatan BOPO/penurunan *efficiency ratio* mengingat bahwa semakin besarnya BOPO maka akan mengurangi tingkat efisiensi perbankan sehingga akan berdampak pada penurunan laba dari perbankan. Permasalahan penelitian juga didukung adanya *gap phenomenon* yaitu terdapat perbedaan pengaruh, baik secara positif maupun negatif, terhadap rasio efisiensi (BOPO) dalam beberapa penelitian sebelumnya. Oleh karenanya, pertanyaan dalam investigasi ini terdiri dari enam faktor berikut:

1. Bagaimana dampak atau pengaruh *Bank Size* terhadap BOPO 2012-2016?
2. Bagaimana dampak atau pengaruh *LDR* terhadap BOPO 2012-2016?
3. Bagaimana dampak atau pengaruh CAR terhadap BOPO 2012-2016?
4. Bagaimana dampak atau pengaruh GWM terhadap BOPO 2012-2016?

5. Bagaimana dampak atau pengaruh NPL terhadap BOPO 2012-2016?
6. Bagaimana dampak atau pengaruh PO terhadap BOPO 2012-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan antara lain untuk :

1. Menganalisis atau menelaah dampak *Bank Size* pada rasio BOPO 2012-2016
2. Menganalisis atau menelaah pengaruh LDR terhadap BOPO 2012-2016
3. Menganalisis atau menelaah pengaruh CAR terhadap BOPO 2012-2016
4. Menganalisis atau menelaah pengaruh GWM terhadap BOPO 2012-2016
5. Menganalisis atau menelaah pengaruh NPL terhadap BOPO 2012-2016
6. Menganalisis atau menelaah pengaruh PO terhadap BOPO 2012-2016

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk perbankan, *output* kajian atau penelitian ini kiranya dapat menambah kontribusi pada perluasan teori dan aplikasi, lebih khusus mengenai kemungkinan ada faktor rasio keuangan yang mempengaruhi BOPO.
2. Bagi pihak perusahaan, *output* dari kajian atau penelitian ini dapat memberikan informasi perihal faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh pada rasio BOPO. Kiranya dapat dilakukan tindakan lebih lanjut apabila diperlukan.